

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001) otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, yang mana daerah provinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu wilayah atau daerah senantiasa berhadapan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu syarat untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada perkembangan ekonomi, tetapi juga mengenai peningkatan kesejahteraan, keamanan dan kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya dimaksud bukan hanya pengolahan sumber daya

alam, tetapi juga mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya kebijakan yang kondusif agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan fiskal kepada aktivitas ekonomi daerah sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kebijakan fiskal pada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak pada inflasi diharapkan negatif. Namun secara teori, kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak, sebagai sumber keuangan utama pemerintah, akan mengakibatkan peningkatan defisit anggaran (Sriyana, 2007).

Permasalahan dalam bidang fiskal tidak hanya mencakup kompleksitas memformulasikan besaran penerimaan dan mengatur kombinasi alokasi pengeluaran negara yang optimal, melainkan lebih menonjol adalah ke arah upaya menutup kekurangan pembiayaan (*financing gap*) berkaitan dengan pembayaran utang. Sehingga tantangan kebijakan fiskal kedepan tidak hanya dalam penentuan strategi pembiayaan yang tepat tetapi juga pada masalah pengendalian defisit anggaran (Departemen Keuangan, 2004)

Apabila realisasi penerimaan daerah meleset dibanding dengan yang telah direncanakan, atau dengan kata lain rencana penerimaan daerah tidak dapat mencapai sasaran seperti apa yang direncanakan, maka berarti beberapa kegiatan proyek atau program harus dipotong. Pemotongan proyek itu tidak begitu mudah, karena bagaimanapun juga untuk mencapai kinerja pembangunan, suatu proyek tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kaitannya dengan proyek lain. Kalau hal ini terjadi, daerah harus menutup kekurangan, agar kinerja pembangunan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula.

Defisit anggaran adalah anggaran yang memang kekurangan karena keterbatasan anggaran (*budget constraint*). Pengeluaran pemerintah di posisi lebih besar dari penerimaan pemerintah ($G > T$), Defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Kombinasi dari besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah terangkum dalam suatu anggaran pemerintah. Dalam struktur APBD, pengeluaran pemerintah Kota/Kabupaten yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai daerah yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian.

Dampak kebijakan fiskal defisit anggaran selain dapat dilihat pada sektor riil, juga dapat dilihat melalui jalur moneter (harga) atau pasar uang (Maryatmo, 2004). Melalui jalur moneter dampak defisit anggaran dapat dilihat dari permintaan akan uang (*money demand*). Kebijakan fiskal yang ekspansif, misalnya kenaikan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan kenaikan permintaan agregat pada putaran pertamanya (*first cycle*). Pada putaran kedua (*second cycle*), kenaikan permintaan agregat akan mengakibatkan nilai harga (P) dan kuantitas baru (Q). Kenaikan P dan Q yang baru mengakibatkan kenaikan permintaan uang (Yusuf, 2003).

Dampak defisit anggaran pada metode penambahan uang dalam ekonomi akan menimbulkan permasalahan meningkatnya tingkat harga barang dan jasa, sehingga menyebabkan peningkatan inflasi (Sriyana, 2007). Pembiayaan defisit anggaran dengan cara penambahan jumlah uang beredar juga akan memiliki dampak pada peningkatan permintaan uang oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai uang dalam ekonomi. Dengan kata lain, masyarakat perlu menambah uang untuk pengeluarannya. Dengan demikian, pembiayaan defisit anggaran oleh pemerintah dengan cara menambahkan uang dalam ekonomi dapat meningkatkan jumlah penerimaan pemerintah (Mankiw, 2003).

Dampak lain dari defisit anggaran ini yaitu realisasi belanja modal suatu daerah, pemerintah daerah menutupi defisit anggaran dengan mengurangi bahkan membatalkan realisasi dari belanja modal. Menurut Halim (2008) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Darise (2008), Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Berdasarkan data pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi, APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan total belanja yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami kenaikan diatas total pendapatannya, sehingga terjadi defisit anggaran.

Tabel 1.1
Defisit Anggaran Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Periode 2012-2017
(Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
Batanghari	54.046	47.965	16.463	11.445	38.480
Bungo	110.075	53.707	94.615	63.000	80.550
Kerinci	50.546	56.384	25.501	14.585	35.990
Merangin	28.739	38.375	58.066	68.000	92.442
Muaro Jambi	28.645	6.051	46.747	14.056	22.998
Sarolangun	49.324	40.765	14.849	55.998	45.554
Tanjab Barat	29.963	0.0000	60.000	65.087	41.176
Tanjab Timur	73.063	39.027	49.291	77.998	50.868
Tebo	40.000	72.817	5.718	15.113	22.501
Kota Jambi	83.533	83.822	111.873	107.130	98.712
Kota Sungai Penuh	106.278	89.411	21.000	13.910	25.031

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan tabel diatas perkembangan defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dari tahun 2015-2019 berfluktuasi tiap tahunnya. Defisit anggaran tertinggi pada tahun 2017 terjadi pada Kota Jambi yaitu sebesar Rp. 111.873.167.565,- dan Kabupaten dengan defisit anggaran terendah di periode tahun yang sama terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintah daerah Kota Jambi belum optimal memanfaatkan potensi daerahnya, sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi lebih berfokus dalam membangun infrastruktur untuk pelayanan masyarakat, seperti pembuatan jalan dan distribusi listrik ke daerahnya. Sedangkan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan defisit anggaran terendah karena kurangnya pembangunan baik fisik dan non fisik di daerah tersebut, luasnya hasil sektor perkebunan Tanjung Jabung Barat menjadi sumber pendapatan utama daerah Tanjung Jabung Barat. Besarnya defisit anggaran yang terjadi

mengidentifikasi adanya pembangunan yang terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya total belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah baik untuk infrastruktur, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, disisi lain defisit anggaran mengidentifikasi belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggunakan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, yang dapat dialokasikan untuk belanja daerah.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jambi, dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin tahun 2020 sebesar Rp 1.365.327.342.502 pada tahun 2019, besarnya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.477.661.040.332 dan besarnya realisasi belanja pada APBD perubahan sebesar Rp 1.520.103.779.332 telah mengalami defisit terhadap anggaran belanja daerahnya sebesar Rp 42.442.739.000 dan Rp 38.876.983.003 pada tahun 2020, hal ini berdampak dengan mengurangi dan menyederhanakan anggaran sehingga berdampak terhadap belanja modal pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Defisit anggaran yang mempengaruhi belanja modal ini tentunya berdampak terhadap pelayanan masyarakat, dimana tujuan dari belanja modal ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Akan tetapi dampak lain yang lebih besar jika tidak dilakukan pengurangan anggaran khususnya belanja modal. Namun seberapa besar pengaruh dari defisit anggaran terhadap belanja modal perlu dikaji lebih lanjut mengingat kepentingan dari belanja modal ini menyangkut pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Prihatiningsih dkk pada tahun 2013 dalam jurnal perspektifnya menyatakan bahwa 90,09 persen variasi besar kecilnya defisit anggaran dipengaruhi oleh variabel belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa. Sementara sisanya 9,01 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil perhitungan dan analisis, menandakan bahwa variabel independen secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa selama periode 2004-2011 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Tebo. Dengan Demikian faktor utama penyebab defisit anggaran pada Kabupaten Tebo selama periode tahun 2004 - 2011 adalah belanja barang dan jasa. Faktor penyebab yang kedua defisit anggaran adalah belanja modal.

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari pada tahun 2016 dimana variabel penelitian yaitu belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal serta kebijakan Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap defisit anggaran di Kabupaten Sarolangun yaitu belanja barang jasa disusul berikutnya belanja pegawai dan belanja modal, sehingga dengan adanya defisit anggaran Pemerintah kabupaten Sarolangun pada tahun 2015 tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini terlihat dari anggaran belanja modal terealisasi sebesar 96%.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka sangat menarik untuk menganalisis “Pengaruh Anggaran dan Defisit Anggaran Terhadap Kebijakan Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2020)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah anggaran berpengaruh terhadap kebijakan belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2020)
2. Apakah defisit anggaran berpengaruh terhadap kebijakan belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2020)

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan variabel yaitu anggaran belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin pada periode anggaran tahun 2020 serta pengaruhnya terhadap kebijakan belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2020)
2. Penelitian ini menggunakan variabel yaitu defisit anggaran minus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Pada periode anggaran tahun 2020serta pengaruhnya terhadap kebijakan belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2020).

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui pengaruh anggaran terhadap kebijakan belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2020)
- 2 Untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran terhadap kebijakan belanja modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Jambi Tahun 2020)

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini dapat menjadi informasi dalam mengetahui masalah anggaran dan defisit anggaran serta belanja modal pada Pemerintah Daerah.

2. Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan khususnya dalam kaitannya mengurangi defisit anggaran dan belanja modal daerah di Kabupaten Merangin.

3. Bagi Peneliti lainnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti defisit anggaran dan permasalahan – permasalahan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten/ Merangin.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap bab yang dimaksud.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini membahas tentang kajian pustaka terhadap teori-teori yang relevan serta memiliki keterkaitan terhadap subyek permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang tahapan penelitian secara spesifik, desain instrumen penelitian, dan metode serta alat analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tahapan-tahapan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan dan pembahasan untuk mendapatkan atau mewujudkan hasil penelitian tersebut

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain itu, dimuat pula saran terhadap penelitian selanjutnya atau ke pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.